

STRATEGI OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Strategy for Optimizing Original Regional Revenue in South Sulawesi Province

Ahmad Zulfikar¹, Harianto², Manuntun Parulian Hutagaol³

¹ Manajemen Pembangunan Daerah. Institut Pertanian Bogor. E-mail : mpdipb@ipb.ac.id

² Departemen Agribisnis. Institut Pertanian Bogor. E-mail : dep-agribisnis@ipb.ac.id

³ Departemen Ilmu Ekonomi. Institut Pertanian Bogor. E-mail: ilmu_ekonomi@apps.ipb.ac.id

ABSTRACT

The increase in regional revenue can be achieved by improving the components of the Regional Original Revenue (PAD) itself, such as by increasing local taxes and fees, supported by appropriate policies. The supporting variables of the PAD components can have a positive impact on increasing PAD. The objective of this research is to analyze the variables influencing the increase in PAD revenue in South Sulawesi Province based on the PAD components using panel data regression analysis and to develop prioritized strategies and policies to enhance PAD in South Sulawesi Province using the Analytical Hierarchy Process (AHP). Statistically, based on the results of panel data regression analysis, the factors significantly influencing the increase in PAD components in South Sulawesi include a positive relationship between the number of hotels and vehicles for tax components and the number of hospitals and schools for fee components. Strategies to increase PAD in South Sulawesi, as determined by AHP, include (a) innovation in revenue sources, (b) infrastructure development, (c) enhancing the skills of human resources in managing PAD, (d) maximizing local tax revenue, and (e) building cooperation networks among relevant agencies and institutions.

Keywords: AHP, panel data regression analysis, local taxes, regional revenue

ABSTRAK

Peningkatan penerimaan daerah dapat dilakukan melalui peningkatan komponen PAD itu sendiri seperti dengan meningkatkan komponen pajak dan retribusi daerah serta didukung oleh kebijakan yang tepat. Dampaknya variabel-variabel pendukung dari komponen PAD dapat ditingkatkan dan berdampak terhadap peningkatan PAD. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi peningkatan penerimaan PAD di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan komponen-komponen PAD menggunakan analisis regresi data panel dan menyusun strategi yang perlu diprioritaskan dan kebijakan untuk meningkatkan PAD di Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Secara statistika berdasarkan hasil analisis regresi data panel, faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi peningkatan komponen PAD di Sulawesi Selatan seperti pajak dan retribusi daerah secara positif yaitu variabel jumlah hotel dan kendaraan untuk komponen pajak, dan variabel jumlah rumah sakit, sekolah untuk komponen retribusi daerah. Strategi untuk meningkatkan PAD di Sulawesi Selatan dari hasil AHP melalui (a) inovasi terhadap sumber-sumber penerimaan, (b) pengembangan infrastruktur, (c) meningkatkan keahlian SDM pada pengelola PAD, (d) memaksimalkan penerimaan pajak daerah, (e) membangun jaringan kerjasama antar instansi dan lembaga terkait.

Kata Kunci: AHP, Analisis Regresi Data Panel, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

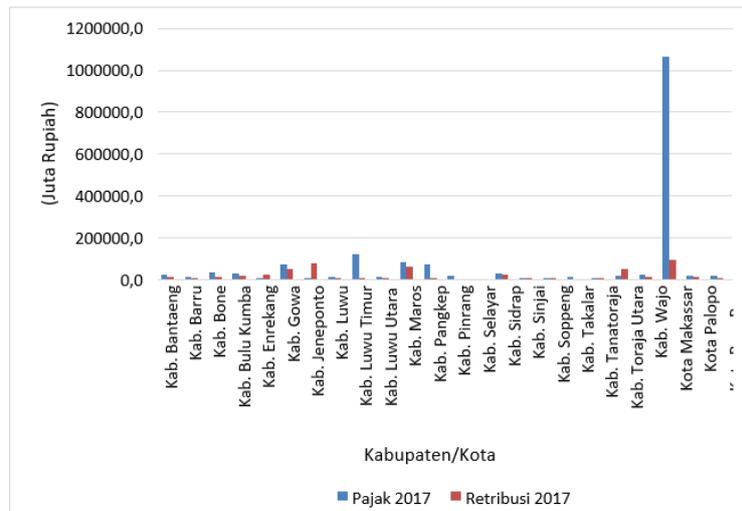
Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Semenjak diterapkannya otonomi daerah timbul reaksi

yang sangat beragam di berbagai daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut adanya kesiapan sumber daya dan sumber dana, responsibilitas serta akuntabilitas dari tiap-tiap daerah di Indonesia. Untuk mendukung penyerenggaraan pemerintahan daerah juga diperlukan adanya perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan daerah, berdasarkan Undang-Undang Naomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian mengalami perubahan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Salah satu cara dalam mengukur kemampuan suksesnya otonomi yaitu dengan melihat seberapa besar nilai PAD yang dapat dicapai oleh daerah tersebut. Besaran PAD

yang relatif kecil akan mempersulit daerah dalam melaksanakan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri, tanpa didukung oleh pihak lain (dalam hal ini pemerintah pusat). Begitupula sebaliknya Semakin besar kontribusi PAD terhadap besaran anggaran APBD maka daerah mudah dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut secara cermat di dalam menetapkan kebijakan meningkatkan PAD.



Sumber: Kementerian Dalam Negeri RI

Gambar 1. Sebaran pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan tahun 2017

Menurut grafik pada Gambar 1, terlihat penerimaan pajak maupun retribusi kabupaten/kota di Sulawesi Selatan masih sangat kecil. Jika dilihat dari kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah untuk mengelola pajak dan retribusi sangatlah banyak seperti pengelola pajak hotel, pajak bumi dan bangunan, serta retribusi pelayanan kesehatan, pendidikan dan lainnya.

Peningkatan penerimaan daerah dapat dilakukan melalui peningkatan kegiatan perekonomian dan memperbaiki manajemen serta menggali komponen dalam PAD seperti pajak dan retribusi. Sehubungan dengan uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian/kajian mendalam mengenai bagaimana strategi peningkatan PAD di Provinsi Sulawesi Selatan.

METODOLOGI PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Kajian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan pertimbangan bahwa wilayah ini memiliki potensi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian dilaksanakan pada Bulan Juli sampai September 2018

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder dalam bentuk data panel atau (*time series*) frekuensi dalam lima tahun dari tahun 2013 sampai 2017 dan data *cross-section* terdiri dari 24 kabupaten/kota seluruh Provinsi Sulawesi Selatan. Cakupan data penelitian untuk model Pajak adalah Jumlah kendaraan bermotor, dan banyaknya hotel disetiap kabupaten/kota Provinsi Sulawesi

Selatan. Untuk model Retribusi cakupan datanya antara lain: banyaknya rumah sakit, jumlah sekolah, dan ketersediaan jumlah terminal disetiap kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan. Serta untuk PAD menggunakan persamaan sehingga hasilnya merupakan penjumlahan antara model pajak dan retribusi.

Metode Pemilihan Responden

Metode yang digunakan dalam pemilihan responden untuk AHP adalah metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah metode pengambilan contoh responden tidak secara acak tetapi pemilihan secara sengaja dengan pertimbangan baik lembaga maupun individu yang mengerti permasalahan yang terjadi serta memiliki pengaruh dalam pengambilan kebijakan baik langsung maupun tidak langsung. Dalam kajian ini, pihak-pihak yang mengerti serta memiliki pengaruh terhadap pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Selain itu, dilakukan wawancara kepada pengusaha untuk memperluas dan mengkombinasikan antar hasil wawancara responden.

Metode Analisis Data

Regresi Panel Data

Data panel merupakan salah satu jenis data yang dapat digunakan dalam analisis model regresi panel data (*Panel Data Regression Models*), atau disebut juga dengan *pooled data* (*pooling* dari pengamatan *times series* dan *cross-section*) kombinasi dari *time series* dan *cross-section* data. Data *cross section* merupakan data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu, perusahaan, negara dan lain-lain. Data *time series* adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Jika data tidak menyebar normal maka data bisa ditransformasi menggunakan logaritma dan beberapa metode lainnya.

Perumusan model yang akan mempengaruhi PAD:

1. Model Pajak

$$Pajak_{i,t} = \alpha_0 + \beta_1 \text{Kendaraan Bermotor}_{i,t} + \beta_2 \text{Hotel}_{i,t} + \varepsilon_i \quad (1)$$

2. Model Retribusi

$$Retribusi_{i,t} = \alpha_0 + \beta_1 \text{Rumah Sakit}_{i,t} + \beta_2 \text{Sekolah}_{i,t} + \beta_3 \text{Terminal}_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (2)$$

3. Model Perumusan PAD

$$Pajak_{i,t} + Retribusi_{i,t} \quad (3)$$

Analytical Hierarchy Process (AHP)

Analytical Hierarchy Process adalah salah satu bentuk model pengambilan keputusan yang pada dasarnya berusaha menutupi semua kekurangan dari model-model sebelumnya (Permadi 1992). Prinsip kerja AHP adalah menyederhanakan suatu persoalan kompleks yang tidak terstruktur, strategik, dan dinamik menjadi sebuah bagian-bagian dan tertata dalam sebuah hirarki (Marimin 2010). Tingkat kepentingan suatu variabel diberi nilai numerik secara subjektif tentang arti penting variabel tersebut dan secara relatif dibandingkan dengan variabel yang lain. Model AHP menggunakan persepsi manusia yang dianggap ahli (*expert*) sebagai input utamanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan

1. Variabel yang Mempengaruhi Model Pajak

Variabel pada penelitian ini menggunakan transformasi data LN argoritma sehingga data dapat menyebar normal. Hasil regresi model pajak digunakan sebagai salah satu komponen untuk persamaan PAD (1). Model yang terbaik untuk model pajak adalah REM, alasannya karena nilai probabilitas > nilai *chi square* (0, 9075) dengan semua variabel bebas berdampak nyata terhadap model estimasi pajak (Tabel 1).

Berdasarkan Tabel 1, hasil model Pajak dengan variabel bebas anatara lain: kendaraan bermotor, dan hotel/penginapan berpengaruh signifikan terhadap model yang dibangun. Secara statistik koefisien peubah penjelas dari hotel mempunyai tanda positif yang menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah hotel kabupaten/kota di Sulawesi Selatan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah.

Tabel 1. Variabel-variabel yang mempengaruhi model pajak

Model	Variabel Bebas		
	Konstanta	Kendaraan Bermotor	Hotel/Penginapan
OLS	18,80398 (0,0000)	0,491824 (0,0000)	0,207399 (0,0000)
FEM	19,39904 (0,0000)	0,4551282 (0,0010)	0,1410256 (0,4810)
REM	18,9605 (0,0000)	0,4796551 (0,0000)	0,2000067 (0,0440)

Sumber: Hasil olahan aplikasi STATA 14

Sejalan dalam itu, menurut Gani *et al.* (2016), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak hotel, kepatuhan wajib pajak restoran berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak daerah.

Variabel jumlah kendaraan bermotor memiliki koefisien positif yang berarti meningkatnya jumlah kendaraan bermotor akan meningkatkan penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Menurut Panjaitan (2018) hasil penelitian ini adalah pajak kendaraan sebagian berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah dengan kontribusi pengaruh diberikan 99% sedangkan

sisanya 1% adalah pengaruh faktor lain tidak diperiksa

2. Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Model Retribusi

Variabel pada penelitian ini menggunakan share distribution sehingga data dapat menyebar normal. menurut hasil regresi panel data model retribusi (2) dapan digunakan sebagai salah satu komponen dalam persamaan PAD. Model yang terbaik untuk pemodelan retribusi adalah REM. Alasannya adalah nilai probabilitas > nilai *chi square* (0,1157) dengan semua variabel bebas berdampak nyata terhadap model estimasi pajak (Tabel 2).

Tabel 2. Variabel-variabel yang mempengaruhi model retribusi

Model	Variabel Bebas			
	Konstanta	Rumah Sakit	Sekolah	Terminal
OLS	4,204432 0,4090	1,61651 0,0000	2,52579 0,0003	0,8388192 0,2240
FEM	27,98916 0,1040	0,9063509 0,0040	-0,8604855 0,7650	-0,949661 0,6390
REM	5,34295 0,4800	1,323888 0,0000	2,573015 0,0320	0,7449553 0,4460

Sumber: Hasil olahan aplikasi STATA 14

Berdasarkan Tabel, hasil model Retribusi dengan variabel bebas antara lain rumah sakit dan sekolah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap model yang dibangun. Sedangkan variabel bebas sekolah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap model yang dibangun. Variabel jumlah rumah sakit berpengaruh signifikan terhadap model yang dibangun. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Pergulistia (2018) hasil penelitiannya adalah menunjukkan bahwa pelayanan

retribusi kesehatan rumah sakit umum dan puskesmas positif dan pengaruh yang signifikan.

Secara statistika variabel sekolah berpengaruh signifikan dan positif terhadap model retribusi. Sedangkan variabel terminal pada model yang dibangun memiliki koefisien artinya berpengaruh negatif terhadap model dan tidak berdampak secara signifikan. Sejalan dengan penelitian Peleau (2016) dimana hasil penelitiannya menunjukkan pertumbuhan

penerimaan retribusi dari jumlah terminal yaitu fluktuatif jika dilihat dari sudut efisiensi dan efektifitasnya.

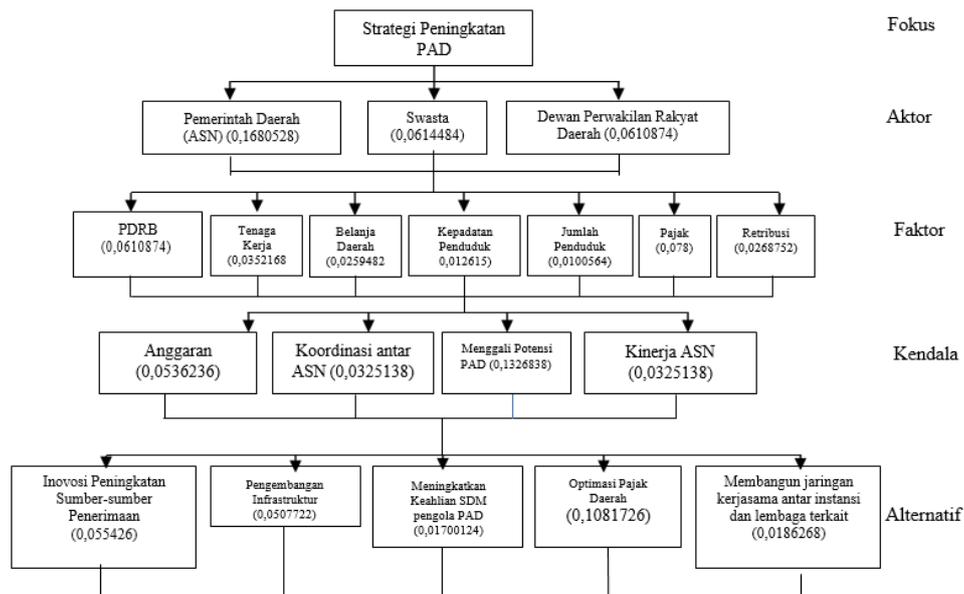
3. Komponen yang mempengaruhi PAD

Hasil dari model pajak dan retribusi dipergunakan sebagai salah komponen untuk model PAD (3). Sejalan dengan itu, dimana menurut Fitra (2016) dalam penelitian tentang pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap PAD setelah dikeluarkannya UU Otonomi Daerah menunjukkan bahwa Pajak daerah dan Retribusi daerah sama-sama memiliki

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PAD.

Strategi peningkatan PAD di Provinsi Sulawesi Selatan

Dari hasil perhitungan menggunakan metode AHP dengan *software* Super Decision maka yang menjadi prioritas untuk peningkatan PAD di Sulawesi Selatan pada masing-masing level ditunjukkan pada Gambar 2.



Sumber: Data primer (2019), diolah
 Gambar 2. Struktur AHP dan nilai bobot hirarki

Dari hasil pengolahan dengan metode AHP, perbandingan antar unsur “Aktor” Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Sulawesi Selatan, yaitu prioritas pertama adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai masing-masing sebesar 0,1680528. Prioritas selanjutnya adalah Swasta dengan nilai 0,0614484. Pemerintah Sulawesi Selatan dinilai memiliki peluang dan prioritas lebih besar daripada Swasta dan DPRD karena beberapa dinas dan badan merupakan instansi pemertintah yang langsung secara teknis mengurus masalah keuangan daerah di lapangan sedangkan dinas terkait adalah instansi yang secara tidak langsung ikut membantu serta mendorong peningkatan PAD di Sulawesi Selatan.

Perbandingan antar elemen “Faktor” yang menempati urutan pertama yaitu pajak

dengan nilai 0,078201, urutan selanjutnya adalah PDRB sebesar 0,0610874, tenaga kerja dengan nilai 0,0352168, retribusi dengan nilai 0,0268752, belanja daerah dengan nilai 0,0259482, kepadatan penduduk dengan nilai 0,012615 serta jumlah penduduk dengan nilai 0,0100564. Kinerja dalam meningkatkan PAD secara maksimal dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh faktor-faktor yang bersinergi secara signifikan seperti variabel-variabel di atas. Namun dalam analisis AHP untuk peningkatan PAD di Sulawesi Selatan, variabel PDRB dan pajak diprioritaskan dibandingkan variabel lainnya karena perbedaannya sangat kecil.

Perbandingan antar elemen “Tujuan” yang menempati prioritas pertama untuk meningkatkan PAD yaitu menggali potensi PAD dengan nilai 0,1326838, prioritas

selanjutnya yaitu anggaran dengan nilai 0,0536236, serta prioritas ketiga dan keempat yaitu koordinasi antar instansi ASN & kinerja ASN dengan nilai 0,0325138. Sementara itu, perbandingan antar elemen “Strategi” yang menempati prioritas pertama untuk meningkatkan PAD yaitu Memaksimalkan Penerimaan Pajak Daerah dengan nilai sebesar 0,1081726. Prioritas strategi berikutnya adalah inovasi sumber-sumber penerimaan dengan nilai sebesar 0,055426. Prioritas ketiga dan seterusnya adalah pengembangan infrastruktur sebesar, membangun jaringan kerjasama antar instansi dan lembaga terkait sebesar 0,0186268, serta meningkatkan keahlian SDM pengolah PAD sebesar 0,01700124.

Implementasi Kebijakan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

1. Memaksimalkan penerimaan pajak daerah

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan pemutakhiran data penerimaan; meningkatkan pengawasan, pelayanan, dan penerapan sanksi pajak; dan meningkatkan kapasitas perencanaan dan koordinasi yang lebih baik.

2. Inovasi terhadap sumber-sumber penerimaan

Output dari kegiatan ini adalah menggali potensi sumber-sumber pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan-pendapatan lain uang sah sehingga dapat meningkatkan PAD di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Intensifikasi yang dilakukan antara lain dengan perhitungan potensi (potensi objek pajak baru dan potensi jumlah wajib pajak), melakukan penyuluhan dan sosialisasi pajak, peningkatan pengawasan dan kualitas pelayanan dan melibatkan unsur-unsur pemerintah sampai yang terendah.

3. Pengembangan infrastruktur

Sasaran meningkatkan penyerapan tenaga kerja maka yang menjadi prioritas pertama kebijakan yang harus dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah melakukan pengembangan infrastruktur fisik seperti pembangunan jalur kereta api di Makassar-Mamuju diperluas ke berbagai kota besar di Sulawesi, pembanguna bandara-bandara besar di daerah kunjungan wisatawan, dan lainnya. Dengan adanya pengembangan infrastruktur fisik pada daerah-daerah baru juga akan membuka peluang para investor untuk berinvestasi dan menanamkan modalnya di daerah tersebut.

4. Membangun jaringan kerjasama antar instansi dan lembaga terkait

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka membangun jaringan kerjasama antar instansi, swasta dan masyarakat dengan mensinergikan program kerja, antara lain dapat dilakukan dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat dan mensinergikan program.

5. Meningkatkan keahlian SDM pada pengelola PAD

Pengembangan SDM tidak hanya dilakukan dikalangan masyarakat saja namun juga dilakukan di pemerintah dengan mengembangkan potensi ASN. Strategi pengembangan SDM yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah memberi kesempatan kepada karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan, memberi penghargaan, dan mengadakan pelatihan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang disajikan sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komponen dari model PAD, dimana komponennya antara lain retribusi dan pajak. Secara statistika menurut hasil analisis regresi data panel berpengaruh secara positif terhadap persamaan model Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sulawesi Selatan. Komponen pajak menggunakan variabel jumlah hotel dan jumlah kendaraan, sedangkan untuk komponen retribusi menggunakan variabel jumlah rumah sakit, jumlah

sekolah, dan jumlah terminal. Variabel jumlah terminal berdampak tidak signifikan terhadap model retribusi dan sisanya sangat berdampak terhadap masing-masing model.

2. Strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Sulawesi Selatan berdasarkan metode AHP, prioritas pertama yaitu: (a) Memaksimalkan Penerimaan Pajak Daerah (0,1081726) (b) inovasi terhadap sumber-sumber penerimaan (0,055426), (c) pengembangan infrastruktur (0,0507722), (d) membangun jaringan kerjasama antar instansi dan Lembaga terkait (0,0186268), dan (e) meningkatkan keahlian SDM pada pengelola PAD (0,01700124).

Saran

Berdasarkan hasil kajian, beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Perlunya meksimalkan kunjungan wisatawan ditingkat provinsi dan kabupaten/kota sehingga populasi hotel dan penginapan serta restoran semakin banyak dan layak sehingga dapat dapat menjadi sumber pemasukan bagi PAD.
2. Perlu adanya kesadaran pihak swasta dan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah tepat waktu kepada pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Gani AIAA, Hidayat K, Pamungkas MGWEN. 2016. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). *Jurnal Perpajakan*. 8(1). 1-7.
- Fitra H. 2016. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Padang setelah dikeluarkannya Undang-Undang Otonomi Daerah. *Jurnal Praktik Bisnis (JPB)*. 5 (1): 2302-9242.
- Marimin, Maghfiroh N. 2010. Aplikasi Teknik Pengambilan Keputusan Dalam Manajemen Rantai Pasok. Bogor (ID): IPB Press.
- Panjaitan NJ *et al.* 2018. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Pajak Daerah. *Jurnal EK & BI*. 1(1).
- Pergulistia E. 2018. Pengaruh Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Barat. *Jurnal Unstrat*. Sumatera Utara.
- Permadi B. 1992. AHP. Jakarta (ID): Pusat Antar Universitas – Studi Ekonomi UI.